



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Perspektif Ekonomi Politik: Dinamika Kebijakan *Green*
***Deal* Uni Eropa dan Kebijakan Energi Jerman**

Skripsi

Oleh

Cindy Christina

6091901171

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional Program
Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Perspektif Ekonomi Politik: Dinamika Kebijakan *Green*
***Deal* Uni Eropa dan Kebijakan Energi Jerman**

Skripsi

Oleh

Cindy Christina

6091901171

Pembimbing

Mireille Marcia Karman S.Sos., M.Litt.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Cindy Christina
Nomor Pokok : 6091901171
Judul : Perspektif Ekonomi Politik: Dinamika Kebijakan *Green Deal* Uni Eropa dan Kebijakan Energi Jerman

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada 10 Januari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: 

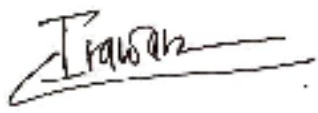
Sekretaris

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M. Litt.

: 

Anggota

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Christina

NPM : 6091901171

Jurusan/Program Studi : Hubungan Internasional Program Sarjana

Judul : Perspektif Ekonomi Politik: Dinamika Kebijakan

Green Deal Uni Eropa dan Kebijakan Energi

Jerman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Desember 2022



Cindy Christina

6091901171

ABSTRAK

Nama : Cindy Christina

NPM : 6091901171

Judul : **Perspektif Ekonomi Politik: Dinamika Kebijakan *Green Deal***

Uni Eropa dan Kebijakan Energi Jerman

Negara maju cenderung memiliki jenis kebijakan lingkungan yang lebih tegas. Tetapi, dunia internasional menyaksikan tendensi negara dalam meninggalkan komitmen kebijakan lingkungan ketika dihadapkan dengan permasalahan atau kepentingan lain. Fenomena berikut adalah perilaku normal di bawah asumsi realisme di mana negara memang tidak melihat perubahan iklim sebagai high politics. Jerman menunjukkan pendirian berbeda atas kebijakan iklimnya. Terlepas dari tantangan domestik dan internasional yang ada, negara ini tetap memiliki pendirian yang konsisten terkait target-target kebijakan iklimnya. Kondisi yang lebih unik bahkan muncul dengan tujuan keamanan energi seiring proses dekarbonisasi strategi iklim domestik. Padahal, Jerman juga diharuskan mempertahankan seluruh komitmen di tengah pandemi dan juga konflik Rusia-Ukraina. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada skripsi ini adalah: “Bagaimana Jerman tetap menjalankan komitmen kebijakan keamanan energi di bawah *Green Deal* Uni Eropa?” Berdasarkan analisis ekonomi politik dari Tanner dan Allouche, dinamika perlu ditelusuri dari konseptualisasi, negosiasi, dan implementasi di tingkat internasional dan nasional. Penelitian menemukan bahwa Jerman memanfaatkan kesempatan yang ada di tantangan domestik serta internasional untuk memajukan agenda iklim dan energi mereka. Adaptasi dilakukan Jerman pada permasalahan COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina dengan program pemulihan ekonomi dan aksi-aksi yang mendorong transisi energi, seperti pengurangan pajak dan biaya energi terbarukan, serta pemberian paket investasi teknologi terkait. Olaf Scholz juga melakukan berbagai amandemen hukum dan kebijakan energi sebagai respon terhadap disrupsi persediaan energi.

Kata Kunci: Jerman, Kebijakan Perubahan iklim, Uni Eropa, Kebijakan Energi.

ABSTRACT

Name : Cindy Christina

Student ID : 6091901171

Title : *Political Economy Perspective: The Dynamics of European Green Deal and Germany's Energy Policy*

Industrialized countries tend to have more stringent environmental policy. Yet, the international arena often finds countries' tendency to abandon their environmental policy commitment when faced with problems or other interests. Such phenomena are considered normal under realism where countries often do not consider climate issues as high politics. Germany shows a different stance in their climate policy. Despite existing domestic and international challenges, the country maintains a consistent stance in regards to their climate targets. This condition stood as unique due to the goal of energy security amidst the decarbonization process in domestic climate strategy. The research question formulated for this thesis is: "How does Germany maintain the implementation of their energy security policy under the European Union's Green Deal?" According to the political economy analysis from Tanner and Allouche, the dynamics need to be explored from conceptualization, negotiation, and implementation on both international and national level. The research suggests that Germany utilizes available opportunities within the domestic and international challenges to advance their climate and energy agenda. Adaptation was done by Germany in facing COVID-19 and Russia-Ukraine Conflict through economic recovery programmes and actions to push energy transition, such as tax deduction and cost for renewables, along with grants of investment packages for related technologies. Olaf Scholz also attempted several amendments on existing energy laws and policies as a response towards the disruption of energy supply.

Keywords: *Germany, Climate Change Policy, European Union, Energy Policy.*

PENGANTAR

Penulis merasa sangat bersyukur dapat menjalankan proses penyelesaian skripsi. Bantuan besar dan diskusi bersama dosen pembimbing – mba Mirei – telah membuka pemahaman penulis terkait topik yang diangkat penulis di dalam skripsi, yaitu tentang kebijakan perubahan iklim dan juga energi di Eropa. Proses penulisan dipenuhi banyak tantangan, tetapi penulis belajar banyak seiring berjalannya penelitian. Dengan kesadaran bahwa penelitian ini masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, penulis berharap pihak-pihak yang membaca dapat memberikan tanggapan ataupun masukan terhadap substansi yang ada.

Bandung, 23 Desember 2022

Cindy Christina

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi terhadap beberapa pihak yang telah mendukung proses penulis selama ini – tanpa mereka, penulis tidak akan mampu sampai di tahapan terakhir dari penyelesaian studinya:

1. Kepada keluarga tersayang, **Mami, Papa, Agi, dan Cai Ni**. Penulis tidak dapat membayangkan hidup tanpa adanya kalian. Terima kasih karena selalu menjadi pendukung nomor 1 penulis.
2. Kepada **Ah Ma, Nai Nai, Kopo**, serta anggota keluarga lain yang penulis harap dapat hubungi/temui lebih sering, penulis sangatlah berterima kasih.
3. Kepada **mba Mirei** yang *super chill and cool*, hehe. Terima kasih banyak atas bimbingan mba selama mata kuliah ini. Semoga mba tidak kesal dengan pertanyaan muter saya yang ragu HI-nya di mana, IPEnya dimana.
4. Kepada **bang Tian dan mas Irawan** selaku dosen penguji yang memberikan masukan konstruktif bagi skripsi penulis; penulis berterima kasih atas segala tanggapan yang diberikan.
5. Kepada grup TOKSIK, **Ceri, Nanas, dan Elpukat**. Tanpa disangka semester terakhir kuliah penulis dibuat jauh lebih seru dan *bearable* dengan kehadiran kalian. Terima kasih.
6. Kepada **PEDS**, yang merupakan tempat terasik untuk mengasah pikiran dan *hang out* bersama. *Truly proud to call you my community*.
7. Kepada **Novi dan Winny**, Potatoh yang penulis sayangi. Terima kasih.
8. Kepada **kool boiz and gal, Stumble** – *you guys are always fun*.

9. Kepada **Sherlythe** yang tidak pernah lupa akan hari-hari spesial, *best of luck* juga untuk skripsinya, dan terima kasih banyak.
10. Kepada **ci Valen** dan **ci Cindy** yang selalu senang membantu dan mendengarkan kekhawatiran penulis dalam penulisan skripsinya; *big thank you*.
11. Dan terakhir, kepada orang-orang di sekitar penulis yang tidak dapat dicantumkan satu-persatu. Penulis menghargai segala waktu bersama dan mengharapkan kebahagiaan untuk mereka semua.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	10
1.2.3 Rumusan Masalah (Pertanyaan Penelitian)	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
1.4 Kajian Pustaka.....	14
1.5 Kerangka Pemikiran	20
1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.6.1 Metodologi Penelitian.....	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	26
1.7 Sistematika Pembahasan	26
BAB 2 ANALISIS DINAMIKA KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM UNI EROPA.....	28
2.1 Sejarah Komitmen Uni Eropa terhadap Kebijakan Perubahan Iklim.....	30
2.2 <i>Green Deal</i> : Visi Ursula Von Der Leyen untuk Eropa	43
2.3 Agenda Baru dari Implementasi Kebijakan Iklim Uni Eropa	51
BAB 3 ANALISIS DINAMIKA KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DAN ENERGI DI JERMAN	53
3.1 Jerman dan <i>Green Deal</i> : Penyesuaian Kebijakan Perubahan Iklim dan Energi di Tingkat Domestik	54
3.2 Tantangan dalam Implementasi Kebijakan	63

3.2.1 COVID-19	63
3.2.2 Konflik Rusia-Ukraina.....	66
3.3 <i>Hitting Two Birds with One Stone: Ambisi Kebijakan Perubahan Iklim dan Keamanan Energi Jerman</i>	68
3.3.1 Respon Pemerintahan Jerman terhadap Tantangan Internasional dan Domestik.....	68
3.3.2 Mengamankan Energi dan Ambisi Perubahan Iklim: Upaya Berlanjut	71
BAB 4 KESIMPULAN	74
Daftar Pustaka	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Analisis Ekonomi Politik Internasional Tanner dan Allouche	23
Gambar 2.1 Linimasa Kebijakan Perubahan Iklim Uni Eropa.....	52
Gambar 3.1 Linimasa Kebijakan Perubahan Iklim dan Energi Jerman	58

DAFTAR SINGKATAN

CAP	: <i>Climate Action Programme</i>
CCA	: <i>Climate Change Act</i>
COP	: <i>Conference of the Parties</i>
ECSC	: <i>European Coal and Steel Community</i>
EEA	: <i>European Environment Agency</i>
EFA	: <i>European Free Alliance</i>
EPA	: <i>Environmental Protection Agency</i>
EPS	: <i>Environmental Policy Stringency</i>
ESR	: <i>Effort-Sharing-Regulation</i>
ETS	: <i>Emissions Trading Scheme</i>
EU	: <i>European Union</i>
FDP	: <i>Free Democratic Party</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
IDS	: <i>Institute of Development Studies</i>
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
LNG	: <i>Liquefied Natural Gas</i>
LULUCF	: <i>Land Use, Land-Use Change and Forestry</i>
NDCs	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
NECP	: <i>National Energy and Climate Plan</i>
SPD	: <i>Social Democratic Party</i>
UE	: Uni Eropa
UN	: <i>United Nations</i>
UNFCCC	: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perjuangan melawan dampak negatif perubahan iklim (*climate change*), hanya terdapat beberapa negara yang dianggap memiliki kemampuan yang cukup. Situasi ini berkaitan dengan pentingnya partisipasi dari negara industri maju (*industrialized countries*) untuk dapat menjamin aksi kebijakan lingkungan yang efektif. Umumnya, kelompok negara maju memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan jumlah populasi besar sehingga dapat mempengaruhi tingkat emisi karbon.¹ Kondisi ini terhitung intuitif mengingat faktor kekayaan dan kemampuan teknologi dari negara maju; mereka pun berkontribusi pada mayoritas dari emisi karbon global sejak pertengahan abad ke - 19.² Dampak dari perubahan iklim yang dirasakan merupakan hasil dari emisi yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh negara maju sehingga komunitas global membutuhkan investasi dana yang besar dari kelompok ini dalam adaptasi kebijakan perubahan iklim.³ Bentuk dukungan dari negara-negara berikut

¹ Ian Bailey dan Hugh Compston, "Introduction," dalam *Feeling the Heat: The Politics of Climate Policy in Rapidly Industrializing Countries*, ed. Ian Bailey dan Hugh Compston (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012), 1.

² Mattia Romani dan Nicholas Stern, "Delivering climate finance: principles and practice for funding the fund," *Policy Paper: The Centre for Climate Change Economics and Policy (CCCEP) & The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, (2011): 3.

³ Ibid.

akhirnya berperan lebih signifikan terutama bagi negara-negara berkembang atau negara dengan perekonomian yang lebih buruk (*poorer countries*).⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dengan indikator *environmental policy stringency* (EPS), dapat ditemukan validasi terhadap kapasitas negara maju/kaya dalam kebijakan lingkungan yang lebih intens. EPS merupakan pengukur dari ketegasan dan pengaruh dari kebijakan lingkungan yang berfokus pada beberapa sektor penting seperti energi dan juga transportasi.⁵ Kebijakan lingkungan yang dimasukkan ke dalam fokus EPS yakni berupa pajak lingkungan (*environmentally-related taxes*), energi terbarukan, dan dukungan efisiensi energi (tarif, sertifikasi energi terbarukan, dan pembiayaan penelitian dan pengembangan terkait), serta standar performa emisi (contohnya batas emisi pembangkit listrik tenaga batu bara dan energi lainnya).⁶ Salah satu penemuan penting dalam laporan OECD yang meneliti tahun 1990-2012 pun mengungkapkan bahwa terdapat korelasi positif antara pendapatan per kapita dan kebijakan lingkungan – negara yang lebih kaya cenderung memiliki kebijakan lingkungan yang lebih kuat yang dibuktikan dari nilai angka indikator yang lebih tinggi (*more stringent environmental policies*).⁷

⁴ Ibid.

⁵ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *How stringent are environmental policies?* <https://www.oecd.org/economy/greeneco/How-stringent-are-environmental-policies.pdf>, 4 (diakses 28 Oktober 2022).

⁶ Ibid.

⁷ Ibid, 8.

Ambisi kebijakan iklim memiliki hubungan erat dengan sektor energi, terutama terkait keamanan energi. Keamanan energi merupakan salah satu tujuan yang dapat dicapai melalui pengurangan dependensi terhadap bahan bakar fosil. Dalam kebijakan iklim, tentunya terdapat upaya dalam menambahkan sumber energi lain, seperti nuklir dan energi terbarukan. Teknologi yang meningkatkan efisiensi energi ini ditujukan untuk mengurangi emisi karbon sekaligus memperbanyak variasi sumber energi. Pada jangka panjang, bila penerapan kebijakan berjalan dengan ideal, pihak yang terkait akan memperoleh hasil positif dari segi lingkungan serta energi. Oleh karena itu, proses dekarbonisasi dalam sektor energi adalah faktor yang dominan dalam kebijakan perubahan iklim.⁸

Namun, terdapat berbagai contoh jelas dari negara maju yang meninggalkan komitmen iklim dan meningkatkan pesimisme terhadap hasil yang ideal. *Conference of Parties ke-15 (COP15) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Kopenhagen 2009 direalisasikan sebagai inisiatif pengumpulan dana yang mengandalkan investasi/bantuan dari negara maju dalam komitmen global melawan perubahan iklim. Komitmen ini mencakup kontribusi negara maju yang memobilisasikan \$100 miliar per tahun sebelum 2020 untuk aksi iklim di negara-negara berkembang.⁹ Komitmen yang

⁸ Serhan Cevik, "Climate Change and Energy Security: The Dilemma or Opportunity of the Century?" *International Monetary Fund*, 9 September 2022, <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/09/08/Climate-Change-and-Energy-Security-The-Dilemma-or-Opportunity-of-the-Century-523249> (diakses 17 Januari 2023).

⁹ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *Aggregate Trends of Climate Change Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2013-2020*, <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d28f963c-en.pdf?expires=1666624763&id=id&accname=guest&checksum=96141C0D75B9C1A8A41772D4B02A6846>, page 3.

serupa kemudian diperpanjang pada COP16 di Cancun dan COP21 di Paris (tujuan dilanjutkan hingga 2025) untuk meneruskan mitigasi dan transparansi dalam implementasi kebijakan iklim.¹⁰ Tetapi, komitmen \$100 miliar dari negara maju dalam COP sendiri masih belum terwujud dengan perkiraan bahwa target kolektif baru dapat tercapai pada 2023.¹¹ Kasus berikut telah menunjukkan bahwa berbagai negara maju masih belum memiliki niat yang cukup besar dalam menjamin pencapaian target – akhirnya mengundang kritik dari para negara berkembang dalam forum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) karena minimnya kemajuan yang ditunjukkan pada tahun 2018 dan 2019.¹²

Selain itu, ditemukan pula sebuah pola dari negara maju yang secara langsung meninggalkan komitmen kebijakan lingkungan/iklim mereka ketika dipertemukan dengan faktor kebijakan/prioritas lain. Hal ini dicontohkan kasus seperti pemerintahan Amerika Serikat/AS di bawah Donald Trump yang menurunkan intensitas upaya iklim dengan membalikkan kebijakan terkait emisi karbon (mulai dari regulasi *Environmental Protection Agency*/EPA dan program energi terbarukan milik Obama) hingga menarik AS dari *Paris Agreement*.¹³ Fenomena ini merupakan perilaku yang dianggap normal di bawah asumsi teori

¹⁰ Ibid.

¹¹ Jennifer A Dlouhy dan Jess Shankleman, “Rich Nations Fail to Meet Climate Fund Target in Blow to COP,” *Bloomberg*, 25 Oktober 2021, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-25/rich-nations-fail-to-meet-climate-finance-target-in-blow-to-cop> (diakses 25 Oktober 2022).

¹² Jess Shankleman, Chiara Albanese, dan Alberto Nardelli, “Rich Countries Fall \$10 Billion Short in Climate Finance Pledges,” *Bloomberg*, 5 Oktober 2021, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/rich-countries-fall-10-billion-short-in-climate-finance-pledges#xj4y7vzkg> (diakses 25 Oktober 2022).

¹³ Matthew Lockwood, “Right-wing populism and the climate change agenda: exploring the linkages,” *Environmental Politics*, (2018): 1-2.

realisme, di mana negara memang tidak melihat perubahan iklim sebagai ‘*high politics*’.¹⁴ Realis berargumen bahwa lebih efektif bila negara hanya menangani isu perubahan iklim secara domestik dibandingkan mengupayakan kerja sama yang menyatukan berbagai jenis kepentingan dan mengandung resiko ketidakpercayaan antar aktor.¹⁵ Terdapat pula argumentasi yang menolak realisme untuk mempertimbangkan masalah perubahan iklim sebagai isu keamanan (*security*) karena anggapan dampak negatif (contohnya migrasi besar-besaran, bencana alam, atau konflik dari bencana alam) yang sifatnya masih lebih kecil urgensinya dibandingkan dengan konflik yang melibatkan perang ataupun konflik bersenjata.¹⁶ Spesifiknya, mendefinisikan/memasukkan isu yang memiliki ancaman seperti perubahan iklim secara berlebihan justru dapat menimbulkan kebingungan dari konsep keamanan di bawah realisme.¹⁷

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Berbeda dengan karakter negara yang mungkin meninggalkan komitmen melawan perubahan iklim ketika dihadapkan dengan hambatan/kepentingan lain, Jerman adalah negara dengan pendirian yang cukup konsisten terkait kebijakan lingkungannya. Jerman merupakan salah satu negara pertama di dunia yang

¹⁴ Anu Unny, “The U.S Inaction on Climate Change: Realism and Its Interpretations,” *Journal of International Studies* 16, (2020): 94.

¹⁵ Ibid, 95.

¹⁶ Menno R. Kamminga, “Why neorealists should resist theorizing climate change as a security issue,” *SSRN*, (2021): 16.

¹⁷ Ibid, 19.

merancang pilihan kebijakan konkret dalam menangani perubahan iklim (terlihat dari pembentukan *The Parliamentary Enquiry Commission/Enquete Commission* pada 1987 beserta laporan *Protection of the Earth's Atmosphere* yang dikeluarkan pada 1989-1990).¹⁸ Sejak saat itu, kebijakan iklim telah menjadi permasalahan dengan bobot kepentingan politik yang cukup besar dalam berbagai ranah diskusi domestik.¹⁹ Kondisi ini juga didukung oleh tindakan para kanselir dan badan kementerian Jerman di berbagai konferensi internasional (termasuk UN Earth Summit 1992 dan 2002, berbagai konferensi UNFCCC, G7, serta G8) dalam advokasi yang lebih ambisius terkait kebijakan iklim dan lingkungan internasional.²⁰ Aksi-aksi berikut bukan hanya terhitung simbolik, tetapi juga membantu menangani berbagai tantangan politik ketika mendiskusikan tentang aksi internasional yang dapat diambil oleh negara-negara lainnya.²¹

Melalui kehadiran susunan pemerintahan terbaru Jerman di bawah Olaf Scholz pada 2021, koalisi antara partai *Social Democratic Party* (SPD) bersama Green Party dan *Free Democratic Party* (FDP) masih tetap menegaskan ambisi kebijakan iklim Jerman dengan fokus pada perlindungan ekonomi sembari mengupayakan penanganan dampak negatif dari perubahan iklim.²² Langkah-

¹⁸ Axel Michaelowa, "German Climate Policy Between Global Leadership and Muddling Through," dalam *Turning Down the Heat: The Politics of Climate Policy in Affluent Democracies*, ed. Hugh Compston dan Ian Bailey (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003), 144.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Helmut Weidner dan Lutz Mez, "German Climate Change Policy: A Success Story with Some Flaws," *The Journal of Environment & Development* 17, no. 4 (2008): 357.

²¹ Ibid.

²² Kerstine Appunn dan Benjamin Wehrmann, "Next German government's climate and energy plans: what will Olaf Scholz do?" *Energy Post*, 4 Oktober 2021, <https://energypost.eu/next->

langkah kebijakan yang dipilih oleh koalisi partai mencakup upaya untuk melakukan transisi bertahap dari penggunaan tenaga batu bara sebelum 2030, mengupayakan penggunaan energi terbarukan untuk 80% jaringan listrik dalam satu dekade, serta mendukung hadirnya 15 juta kendaraan listrik sebelum 2030.²³ Terlebih lagi, transisi dari energi gas juga ditargetkan sebelum 2040 beriringan dengan penetapan harga minimum karbon sebesar €60 per ton.²⁴ Secara keseluruhan, susunan koalisi juga bersikap optimistis membawa Jerman menuju jalur pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C, sesuai dengan ketentuan dari *Paris Agreement*.²⁵ Agenda iklim Jerman berikut dipayungi oleh kehadiran *Green Deal* di Uni Eropa yang mengupayakan keselarasan kebijakan dengan adanya tujuan kolektif terkait perubahan iklim. Kondisi ini ditegaskan Svenja Schulze, Menteri Lingkungan Jerman pada masa Angela Merkel, yang menyatakan bahwa rencana kebijakan iklim nasional memang dibuat berdasarkan aturan-aturan yang telah ada, tetapi juga bergantung dan disesuaikan pada bagaimana UE berencana untuk memiliki target iklim yang kolektif.²⁶

Namun, dalam merealisasikan ambisi ini, Jerman dihadapkan dengan beberapa tantangan besar. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Jerman memang

german-governments-climate-and-energy-plans-what-will-olaf-scholz-do/ (diakses 27 Oktober 2022).

²³ Stuart Braun, "Germany's new coalition promises climate revolution," *DW*, 26 November 2021, <https://www.dw.com/en/germanys-new-coalition-promises-climate-revolution/a-59951358> (diakses 27 Oktober 2022).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soren Amelang dan Benjamin Wehrmann, "Reactions to EU's Green Deal from Germany," *Clean Energy Wire*, 12 Desember 2019, <https://www.cleanenergywire.org/news/reactions-eus-green-deal-germany> (diakses 17 Januari 2023).

sempat menurun sebesar 41,3% di 1990-2020 (sekitar 729 juta ton CO₂) .²⁷ Tetapi, penurunan drastis GRK pada 2020 bukan secara menyeluruh berasal dari performa kebijakan iklim dan juga perubahan struktural yang diupayakan pemerintah.²⁸ Presiden dari *Federal Environment Agency*, Dirk Messner, menyatakan bahwa COVID-19 adalah faktor yang berperan besar dalam menekan angka emisi karbon pada 2020.²⁹ Pandemi COVID-19 mendorong turunnya jumlah konsumsi energi listrik sementara pasokan listrik berhasil ditingkatkan dari pembangkit listrik tenaga angin (*onshore wind energy*) karena kondisi ideal dari cuaca.³⁰ Terlebih lagi, beberapa sektor lainnya, seperti energi, industri, dan agrikultur juga berkontribusi pada penurunan emisi karena adanya penurunan tingkat produksi.³¹ Resiko lebih besar menanti upaya penanganan iklim karena emisi telah digambarkan meningkat drastis kembali dari 2021 di berbagai sektor.³² Di samping itu, susunan pemerintahan turut dibebani penanganan ekonomi yang lebih hijau tanpa menaikkan pajak secara signifikan dan menambah utang Jerman di tengah COVID-19 – tidak hanya berfokus menempatkan negara pada sistem

²⁷ Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, *Germany's current climate action status*, https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Downloads/E/germany-s-current-climate-action-status.pdf?__blob=publicationFile&v=11 , 2.

²⁸ Ibid.

²⁹ Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, *Final climate action status of 2020: emissions fell by 41% compared to 1990*, <https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2022/20220120-final-climate-action-status-of-2020-emissions-fell-by-41-compared-to-1990.html> (diakses 10 November 2022).

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, *Germany's current climate action status*, https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Downloads/E/germany-s-current-climate-action-status.pdf?__blob=publicationFile&v=11 , 2.

ekonomi yang kompetitif, tetapi juga mengurangi dampak negatif yang dikeluarkan pada planet.³³

Isu lain yang juga menjadi tantangan besar dalam kebijakan lingkungan Jerman adalah konflik Rusia-Ukraina. Eropa dikenal sebagai region importir gas alam terbesar di dunia dengan Jerman sebagai salah satu pengguna terbesar (905 TWh pada 2021).³⁴ Eropa kemudian dihadapkan dengan harga energi yang meningkat drastis mendekati musim dingin karena Rusia memilih untuk menahan persediaan gas alam sebagai respon atas sanksi yang diberikan oleh negara-negara bagian Barat.³⁵ Langkah ini menjadi sangat signifikan karena Rusia mengontrol sekitar 40% dari total konsumsi gas Uni Eropa/UE melalui jalur pipa.³⁶ Pada tingkat yang lebih buruk, region Eropa akan berhadapan dengan resiko kematian listrik, gangguan pada operasi pabrik, hingga resesi yang mendalam.³⁷ Hal ini mendorong berbagai negara di Eropa untuk mencari sumber energi baru dan berusaha meringankan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang melambat diiringi harga-harga kebutuhan rumah yang akhirnya naik.³⁸

³³ Rob Schmitz, "What you need to know about Germany's new chancellor and coalition government," *NPR*, 8 Desember 2021, <https://www.npr.org/2021/12/08/1062130622/germany-new-chancellor-olaf-scholz-coalition-government> (diakses 27 Oktober 2022).

³⁴ Elizabeth Melimopulos, "How bad could Europe's energy crisis get this winter?" *Aljazeera*, 4 Oktober 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/10/4/how-bad-could-europes-energy-crisis-get-this-winter> (diakses 27 Oktober 2022).

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ David McHugh, "Europe is facing an energy crisis as Russia cuts gas. Here's why," *PBS* 6 September 2022, <https://www.pbs.org/newshour/world/europe-is-facing-an-energy-crisis-as-russia-cuts-gas-heres-why> (diakses 27 Oktober 2022).

³⁸ *Ibid.*

Sebagai respon terhadap segala permasalahan di atas, pemerintahan Jerman cenderung bersifat optimis – mempertahankan ambisi kebijakan iklimnya bahkan setelah 2 tahun melewati pandemi.³⁹ Pemerintahan Scholz cenderung mempertimbangkan jalur menuju *climate neutrality* sebagai cara paling efektif untuk menghilangkan ketergantungan pada energi Rusia.⁴⁰ Idealnya, Jerman pun mengharapkan percepatan transformasi energi dengan lebih pesat tanpa mengorbankan sedikit pun target iklimnya dalam menghadapi dampak konflik kedua negara.⁴¹ Pendirian ini juga memiliki banyak pendukung, dengan beberapa pihak yang memprediksi bahwa perang akan mempercepat transisi energi Jerman dari batu bara.⁴² Di sisi lain, berbagai pihak juga mempertimbangkan bahwa isu seperti harga energi yang lebih tinggi di beberapa tahun ke depan dan dampak ekonomi lainnya akan menjadi isu yang lebih diprioritaskan dibandingkan perubahan iklim.⁴³

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian menetapkan dua aspek dalam pembatasan masalah, yaitu dari sektor kebijakan dan linimasa terkait. Pertama, penelitian berfokus pada kebijakan di sektor energi. Sektor energi dianggap berhubungan erat dengan implementasi

³⁹ Soren Amelang et al., “Putin’s war against Ukraine and its implications for the German and EU energy transition,” *Clean Energy Wire*, 10 Agustus 2022, <https://www.cleanenergywire.org/dossiers/putins-war-against-ukraine-and-its-implications-german-and-eu-energy-transition> (diakses 28 Oktober 2022).

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

kebijakan *Green Deal* karena produksi dan penggunaan energi berkontribusi sebesar lebih dari 75% total emisi GRK di Uni Eropa.⁴⁴ Dekarbonisasi dalam sektor energi Uni Eropa kemudian diartikan sebagai langkah yang esensial untuk menerapkan strategi jangka panjang serta mencapai tujuan *carbon neutrality* mereka sebelum 2050.⁴⁵ Jerman adalah negara dengan tingkat penggunaan energi terbesar dibandingkan anggota lainnya dan memegang peran penting dalam perkembangan kebijakan energi Uni Eropa.⁴⁶ Selain itu, negara ini dipertimbangkan sebagai pemimpin dalam produksi energi terbarukan dan inovasi teknologi dalam pasar.⁴⁷

Berikutnya, penelitian akan berfokus pada fenomena yang terjadi kurun waktu 2019-2022. Pembatasan ini didasari oleh beberapa kasus domestik dan internasional yang dilihat mempengaruhi implementasi kebijakan lingkungan Jerman secara signifikan, yakni: dinamika implementasi *Green Deal* Uni Eropa, pandemi COVID-19, dan krisis energi Eropa yang tengah terjadi akibat konflik Rusia-Ukraina.

⁴⁴ European Commission, *A clean energy transition*, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_en (diakses 10 Oktober 2022).

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ John S. Duffield dan Kirsten Westphal, "Germany and EU Energy Policy: Conflicted Champion of Integration?" dalam *Toward a Common European Union Energy Policy: Problems, Progress, and Prospects*, ed. Vicki L. Birchfield dan John S. Duffield (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 169.

⁴⁷ Robert Henry Cox dan Mariam Dekanozishvili, "German Efforts to Shape European Renewable Energy Policy," dalam *Energy Policy Making in the EU*, ed. Jale Tosun, Sophie Biesenbender, dan Kai Schulze (London: Springer-Verlag, 2015), 167-168.

Tahun 2019 dipilih sebagai acuan karena merupakan permulaan dari *Green Deal* dipresentasikan dalam Uni Eropa.⁴⁸ *Green Deal* menjadi analisis kebijakan yang penting karena dipertimbangkan sebagai salah satu susunan kebijakan perubahan iklim Uni Eropa yang terpenting dan terbaru dengan berbagai target yang masih dalam proses untuk dicapai. Menilik poin tersebut, penelitian dapat berfokus pada nilai-nilai dan rancangan kebijakan yang dimiliki oleh *Green Deal* dan pengaruh yang direfleksikan pada konteks domestik kebijakan lingkungan Jerman.

Selanjutnya, tahun 2020 diikuti oleh hadirnya COVID-19 yang ditetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* oleh *World Health Organization* (WHO).⁴⁹ Tulisan ini kemudian memetakan dampak pandemi terhadap kebijakan lingkungan yang dirumuskan oleh Uni Eropa beserta dengan Jerman. Penelusuran terhadap dampak pandemi COVID-19 terhitung penting untuk menunjukkan eksplorasi dari dampak yang timbul pada berbagai sektor. Konteks ini juga akan berperan berperan sebagai faktor dominan yang turut mempengaruhi berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan aktor pemerintahan.

Penelitian ini juga mengkaji krisis energi di Eropa yang terjadi akibat invasi Rusia di Ukraina. Penelitian akan melakukan analisis hingga periode Agustus 2022 – sesuai dengan masa Rusia menghentikan persediaan gas dan

⁴⁸ European Commission, *A European Green Deal*, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#timeline (diakses 10 November 2022).

⁴⁹ WHO, *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*, <https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19> (diakses 10 Oktober 2022).

menimbulkan permasalahan terhadap keamanan energi Jerman.⁵⁰ Kasus ini menjadi penting untuk mempertimbangkan respon Jerman dalam menangani masalah mengingat ambisi melawan perubahan iklim yang juga menuntut langkah strategis dari pemerintah.

1.2.3 Rumusan Masalah (Pertanyaan Penelitian)

Sesuai dengan elaborasi latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah sebelumnya, maka rumusan pertanyaan penelitian dalam tulisan berikut adalah: **“Bagaimana Jerman tetap menjalankan komitmen kebijakan keamanan energi di bawah *Green Deal* Uni Eropa?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendalami konteks ekonomi-politik implementasi *Green Deal* Uni Eropa dan komitmen kebijakan energi yang diambil oleh Jerman. Penelitian mempertimbangkan faktor-faktor penting dalam konteks domestik Jerman dan juga faktor internasional yang mempengaruhi dinamika kebijakan tersebut. Tulisan berikut juga berniat memahami alasan dibalik kokohnya ambisi iklim Uni Eropa dan Jerman terlepas dari segala tantangan dan skeptisisme yang ada dalam diskursus penanganan perubahan iklim internasional.

⁵⁰ DW, *Nord Stream 1: Russia's Gazprom halts gas supply to Germany*, <https://www.dw.com/en/nord-stream-1-russias-gazprom-halts-gas-supply-to-germany/a-62978155> (diakses 10 November 2022).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah literatur ekonomi-politik yang tersedia tentang kebijakan *Green Deal* Eropa dan kebijakan energi Jerman. Didasarkan pada konsiderasi untuk merangkum segala perkembangan penting dari kebijakan *Green Deal* secara kronologis, penulis berharap bahwa isu dan konteks baru yang dijelaskan dengan holistik juga dapat bermanfaat untuk memperdalam tingkat analisis atas kinerja *Green Deal*. Penelitian turut menegaskan kepentingannya dalam pembahasan akademis tentang *international climate governance*, terutama di sektor transisi energi dalam mencapai penurunan GRK. Di sisi lain, penelitian dapat digunakan sebagai acuan konteks kebijakan yang memperhitungkan tidak hanya faktor kebijakan secara global, tetapi juga dengan situasi spesifik Jerman dengan dinamika pemerintah domestiknya.

1.4 Kajian Pustaka

Perdebatan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan upaya melawan perubahan iklim. Keenam literatur kemudian diletakkan pada 3 pengelompokan argumen, yaitu: kelompok yang mendukung konsep *degrowth*, kelompok yang mendukung konsep *green growth*, beserta kelompok yang memberikan perbandingan terhadap keduanya.

Pada spektrum pendirian yang mendukung konsep *degrowth*, literatur pertama berasal dari Parrique et al. menuangkan pandangannya dalam tulisan

“*Decoupling Debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability*”.⁵¹ Dalam menjawab pertanyaan apakah negara dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) secara bersamaan, ia menyatakan bahwa negara harus mulai berpindah dari *decoupling hypothesis* tersebut karena sikapnya yang tidak realistis.⁵² *Decoupling hypothesis* sendiri dapat diartikan sebagai ambisi di mana negara percaya bahwa dampak negatif lingkungan dapat dipisahkan dari akumulasi produk domestik bruto (PDB)/proses pertumbuhan ekonomi.⁵³ Kesimpulan yang ditemukan dari tulisan ini adalah tidak ditemukannya bukti empiris dimana *decoupling* dapat terjadi pada skala yang bermakna serta bagaimana hal tersebut juga tidak mungkin terjadi di masa depan.⁵⁴ Pada akhirnya, para penulis percaya bahwa para pembuat kebijakan justru harus mengorbankan tingkat produksi dan konsumsi ekonomi demi dapat menjawab kekhawatiran lingkungan.⁵⁵

Argumen *degrowth* juga didukung oleh literatur berjudul “*Can Green Growth Really Work and What are the True (Socio-) Economics of Climate Change?*” oleh Ulrich Hoffmann. Penulis mendukung argumentasi *degrowth* dengan menyatakan bahwa transformasi membutuhkan upaya yang jauh lebih besar dalam menghadapi kompleksitas perubahan iklim dibanding sebatas

⁵¹ Timothee Parrique et al., “Decoupling Debunked: Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability,” *The European Environmental Bureau*, (2019): 1-80.

⁵² Ibid, 3.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid, 5.

mengandalkan inovasi dan restrukturisasi pada sistem ekonomi yang ada.⁵⁶ Faktor seperti pertumbuhan, ekspansi teknologi dan populasi, restriksi pemerintahan, serta isu sistematis justru masih menghambat ambisi-ambisi *green growth* untuk dapat terwujud.⁵⁷ Ia kemudian turut memasukkan beberapa literatur lainnya yang menjelaskan bagaimana *green growth* kerap kali terlalu naif menginterpretasikan perkembangan teknologi dan struktural sebagai langkah yang cukup untuk memisahkan GRK dan pertumbuhan tanpa sekalipun mempertimbangkan struktur pasar yang asimetris, faktor pemerintahan *supply chain*, permasalahan sosial, dan faktor pendorong ekonomi lainnya.⁵⁸

Beranjak pada pendirian literatur pendukung argumentasi *green growth*, pertama ditelusuri tulisan Stéphane Hallegatte et al. yang berjudul “*From Growth to Green Growth – A Framework*”. Literatur ini lebih berfokus mendukung implementasi *green growth* dengan merancang kerangka analisis yang membantu kontribusi keberlangsungan lingkungan dan dorongan pertumbuhan ekonomi.⁵⁹ Penulis menggambarkan bahwa kebijakan lingkungan memang membutuhkan biaya pada jangka pendek (seperti investasi atau biaya operasional), tetapi akan menimbulkan keuntungan ekonomi dan justru berkontribusi pada pertumbuhan dengan adanya koreksi pada kegagalan pasar (*market failures*).⁶⁰ Menyadari

⁵⁶ Ulrich Hoffmann, “Can Green Growth Really Work and What are the True (Socio-) Economics of Climate Change?” *United Nations Conference on Trade and Development*, (2015): 1-20.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid, 15.

⁵⁹ Stephane Hallegatte et al. “From Growth to Green Growth – A Framework,” *NBER Working Paper* 17841, (2012): 1-38.

⁶⁰ Ibid, 30

adanya resiko berkurangnya PDB, penulis menyarankan beberapa fokus kebijakan, yaitu: peningkatan faktor produksi, melakukan transisi pada ekonomi yang lebih bersih, sistem ekonomi yang lebih efisien, peningkatan *resilience*/ketahanan atas bencana lingkungan, serta meningkatkan upaya penyediaan lapangan kerja dan pemberantasan kemiskinan.⁶¹

Literatur kedua yang mendorong pendapat *green growth* berjudul “*Green Economy and Green Growth – Opportunities for Sustainable Development*” oleh Lucretia Dogaru. Praktik *green economy* dan *green growth* dalam literatur ini didukung sebagai alat kebijakan yang berguna untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sebagai tujuan besar (sekaligus memastikan kondisi alam dapat terus menyediakan sumber daya dan unsur lain yang diperlukan).⁶² Penulis juga mempertimbangkan tiga *green ideas* (*green economy*, *green growth*, dan *sustainable development*) sebagai kehadiran yang selaras dalam implementasi kebijakan.⁶³ Berdasarkan kesempatan yang ditawarkan oleh *green economy*, peranan dan efektivitas kebijakan pada level internasional dan masyarakat kemudian memainkan peran yang esensial.⁶⁴ Melihat hal tersebut, disebut bahwa isu pembuatan keputusan, transparansi, dan keterlibatan pihak terkait dengan akses langsung terhadap informasi penting menjadi contoh dari praktik yang

⁶¹ Ibid, 30-31.

⁶² Lucretia Dogaru, “Green Economy and Green Growth – Opportunities for Sustainable Development,” *Proceedings* 63, no.1 (2021): 1-8.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid, 7.

ideal.⁶⁵ Sederhananya, realisasi kesempatan *green growth* dapat terjadi melalui koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak baik dari sektor publik maupun privat.⁶⁶

Selanjutnya, dikaji dua literatur terkait yang membandingkan *degrowth* dan *green growth*. Klaas Lenaerts, Simone Tagliapietra, dan Guntram B. Wolff menjabarkan opininya tentang kedua konsep dalam “*The Global Quest for Green Growth: An Economic Policy Perspective*”. Para penulis memperjelas perdebatan yang ada di mana *green growth* bersikap optimis pada kebijakan dan teknologi untuk mampu melaksanakan *decoupling* sementara *degrowth* menentang optimisme tersebut dengan menyatakan bahwa ekonomi global harus diperlambat dan melakukan redistribusi.⁶⁷ Penulis lalu meneruskan penjelasan dengan menekankan argumen penting yang disampaikan oleh kedua sisi (dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing). *Degrowth* disebut memiliki dasar argumen yang baik dengan mengatakan bahwa tingkat *decoupling* belum dapat mencapai target yang cukup secara global (terutama dengan target yang ada pada 2050).⁶⁸ Namun, penulis juga merasa bahwa skenario *degrowth* tidak mungkin diimplementasikan secara global.⁶⁹ Pada saat yang bersamaan, *green growth* memiliki keunggulan dalam hal pragmatismenya – penulis menjelaskan bahwa

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Klaas Lenaerts, Simone Tagliapietra, dan Guntram B. Wolff, “The Global Quest for Green Growth: An Economic Policy Perspective,” *Sustainability* 14, (2022): 1.

⁶⁸ Ibid, 11

⁶⁹ Ibid, 12.

penciptaan kondisi ideal melalui dorongan *clean energy* dan investasi yang efisien kemudian memiliki potensi yang cukup besar.⁷⁰

Terakhir, literatur oleh Michael Jacobs yang berjudul “*Green Growth: Economic Theory and Political Discourse*” menambahkan kontribusi terhadap poin argumen terakhir dengan mengumpulkan berbagai pandangan yang juga mendukung serta mengkritik *green growth*. Tulisan ini menyebutkan bahwa kasus *green growth* bagi kebanyakan negara masih belum dapat dibuktikan (kebijakan lingkungan masih dianggap berdampak negatif pada pertumbuhan dibanding mendorongnya) terutama pada negara dengan kondisi ekonomi yang sulit.⁷¹ Pendirian dari literatur ini juga cenderung netral dengan mengatakan bahwa *green growth* dapat terjadi pada kasus-kasus tertentu dan juga dapat gagal di kasus-kasus lainnya.⁷² Penulis enggan untuk memberikan kesimpulan umum atas apakah *green growth* dapat diimplementasikan karena berbagai interpretasi yang juga berbeda-beda terhadap konsep tersebut.⁷³

Berdasarkan kajian literatur di atas, telah ditemukan variasi pendapat mengenai konsep *degrowth* dan *green growth* di mana beberapa penulis memilih untuk mendukung salah satu konsep serta membandingkan potensi keduanya dalam implementasi kebijakan terkait perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini akan berfokus pada pendirian yang mendukung *green growth* –

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Michael Jacobs, “Green Growth: Economic Theory and Political Discourse,” *Centre for Climate Change Economics and Policy Working Paper* 108, (2012): 1-24.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

menunjukkan bagaimana konsep ini dianut dalam implementasi *Green Deal* dan kebijakan energi Jerman.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai panduan yang mengarahkan proses penelitian, penulis mencantumkan kerangka ekonomi politik dari perubahan iklim (*political economy of climate change*) oleh Thomas Tanner dan Jeremy Allouche yang diterbitkan dalam *Institute of Development Studies (IDS) Bulletin*. Keduanya memulai kerangka analisis ini dari kritik terhadap teori/implementasi yang ada tentang perubahan iklim yang seringkali mengabaikan aspek politik dan menekankan proses linear dalam kebijakan.⁷⁴ Proses-proses seperti formulasi dan translasi dari inisiatif internasional menuju konteks kebijakan nasional dan subnasional juga dipandang para penulis sebagai poin analisis yang sering terlupakan untuk menjelaskan negosiasi internasional dan interaksi di sektor privat.⁷⁵ Beberapa artikel-artikel lain dalam isu IDS Bulletin berikut kemudian mendemonstrasikan kajian empiris dari proses ekonomi politik yang disebutkan dalam kerangka milik Tanner dan Allouche.

Menurut keduanya, ekonomi politik dalam kerangka ini dipahami sebagai proses di mana ide (*idea*), kekuatan (*power*), dan sumber daya (*resources*) mengalami konseptualisasi (*conceptualised*), negosiasi (*negotiated*), dan

⁷⁴ Thomas Tanner dan Jeremy Allouche, "Towards a New Political Economy of Climate Change Development," *IDS Bulletin* 42, no. 3 (2011): 1.

⁷⁵ Ibid.

implementasi (*implemented*) oleh berbagai kelompok dalam skala yang berbeda.⁷⁶ Kerangka ini juga pertama kali dirancang untuk memperluas analisis dari perspektif *environmental politics* yang sikapnya terlalu *state-focused* dalam mencakup segala interaksi antara negara dan juga aktor non-negara.⁷⁷ Selain itu, kerangka ini menyadari karakteristik isu dan solusi perubahan iklim yang *cross-sectoral* dan juga tidak secara tepat hanya masuk ke dalam satu sektor.⁷⁸ Merepresentasikan perubahan iklim sebagai masalah global yang turut membutuhkan solusi global, penulis berusaha mengkaji bagaimana inisiatif perubahan iklim dikonseptualisasikan, dinegosiasikan, dan diimplementasikan di *global level*, dan kemudian di re-konseptualisasikan, dire-negosiasikan, dan diimplementasikan pada *national* dan *subnational levels* (diiringi interaksi yang juga terjadi antara tingkat-tingkat tersebut).⁷⁹

Kerangka Tanner dan Allouche menekankan observasi pada 5 isu penting, yaitu: proses kebijakan; skala; rupa studi perubahan iklim dan riset; kelangkaan sumber daya dan kemiskinan; serta pembuatan keputusan.⁸⁰ Pertama, proses kebijakan dijelaskan dengan kompleks di mana faktor ideologi, aktor, dan *power relations* memainkan peran yang besar. Kedua, kerangka ini memberikan analisis lebih mendalam bukan hanya di level internasional, tetapi juga mendalami level nasional dan subnasional. Ketiga, berbeda dengan penelitian/ilmu pengetahuan

⁷⁶ Ibid, 1-2.

⁷⁷ Ibid, 2.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid, 4.

⁸⁰ Ibid, 5.

perubahan iklim umumnya, kerangka ini berusaha memperhatikan bagaimana konstruksi sosial dari ilmu pengetahuan mempengaruhi naratif/perspektif dalam masyarakat. Keempat, perhatian besar diberikan pada proses politik yang membutuhkan mediasi ketika kompetisi atas sumber daya terjadi (sehingga tidak hanya menjelaskan hasil distributif yang ada). Kelima, beranjak dari ketergantungan pada faktor rasionalitas, aksi kolektif, dan *rent-seeking*, kerangka ini mengkaji tentang motivasi ideologi dan *power relations* antar aktor.

Mereferensikan peranan ide dan ideologi pada tulisan Melissa Leach, Ian Scoones, dan Andy Stirling, *ideological framings* didefinisikan sebagai bagian naratif yang didukung oleh aktor, jaringan, dan institusi yang berusaha menjustifikasikan sekelompok aksi tertentu. Lebih rincinya, Tanner dan Allouche juga mengutip Jenifer Clapp dan Peter Dauvergne tentang beberapa *environmental ideologies*, yaitu: *market liberals* (menekankan keuntungan dan dinamika perdagangan bebas serta teknologi); *institutionalists* (menekankan kebutuhan untuk institusi dan norma global yang lebih kuat); *bio environmentalists* (menekankan adanya batasan planet dalam mendukung dinamika peradaban); dan juga *social greens* (melihat masalah sosial dan politik sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan). Asumsi yang digunakan dalam kerangka lalu menggunakan ideologi *market liberalism* sebagai ideologi terkuat dalam *structural power*.⁸¹

Tanner dan Allouche merasa bahwa dinamika *global environmental governance* pada masa ini didominasi oleh '*liberal environmentalism*

⁸¹ Ibid, 5.

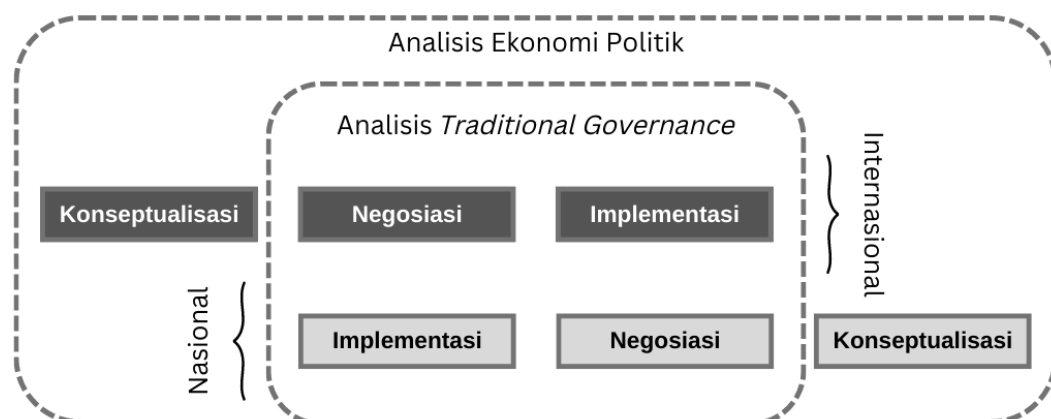
compromise' – konsep keberlanjutan/*sustainability* diubah menjadi sekumpulan pemahaman teknis yang menghilangkan segala elemen radikal demi meminimalisasi kerugian sebisa mungkin terhadap ide ortodoks/tradisional dari perkembangan ekonomi (*economic development*). Kerangka ini turut menyatakan bahwa terdapat *intersection* atau pertemuan antara *ideas* dan *power*. Pada kondisi tertentu, *power* juga dapat digunakan sebagai konsep menyeluruh yang merangkum ide dan juga ideologi.⁸² *Power* dapat berbentuk *relational* dan *structural* (*relational* dalam artian kemampuan dari aktor yang mampu mempengaruhi pihak lain untuk mengubah kebijakannya, sementara *structural* berarti otoritas atau kuasa atas hasil/*outcomes* dalam kerangka global keamanan, keuangan, produksi, dan *knowledge relationships*).⁸³ Kerangka Tanner dan Allouche kemudian memilih berfokus pada *structural power* yang ditekankan oleh figur seperti Susan Strange dalam analisis ekonomi politik internasional.

Berikut diilustrasikan gambaran lengkap dari analisis ekonomi politik internasional Tanner dan Allouche:

Gambar 1.1 Analisis Ekonomi Politik Internasional Tanner dan Allouche

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid, 6.



Sumber: Thomas Tanner dan Jeremy Allouche, "Towards a New Political Economy of Climate Change Development," *IDS Bulletin* 42, no. 3 (2011): 6.

Tanner dan Allouche menaruh perhatian pada berbagai aspek *power* dan pengaruhnya dalam proses negosiasi (*imposition, domination, structural determination, dan cultural hegemony*).⁸⁴ Sesuai dengan rangka yang diilustrasikan, elemen-elemen dalam proses kebijakan dipecah menjadi 6 area analisis, yaitu: konseptualisasi, negosiasi, dan implementasi inisiatif perubahan iklim di masing-masing level internasional dan juga nasional. Program-program kebijakan terlihat diperdebatkan pada level nasional dan menyediakan ruang bagi negosiasi dan interpretasi antara *civil society*, NGOs, aktor privat, dan berbagai kementerian. Berbeda dengan pendekatan *bottom-up*, kerangka ini lebih mementingkan *primacy of global politics* (mengutamakan dinamika politik global) dalam pembuatan kebijakan dalam ekonomi politik perubahan iklim dan perkembangan (*development*).⁸⁵

Namun, Tanner dan Allouche juga mengingatkan bahwa terdapat beberapa ciri dari kerangka ini yang wajib diperhatikan. Pertama, kerangka di atas tidak

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

menggambarkan proses yang linear dari konseptualisasi hingga implementasi. Sebaliknya, kerangka ini melakukan dekonstruksi terhadap dinamika kebijakan. Kedua, batasan antara dinamika internasional dan nasional bersifat *permeable/fluid*. Dinamika nasional sering mempengaruhi dinamika internasional dan begitu pula sebaliknya. Kondisi yang sama juga berlaku pada ketiga lensa yang menganalisis ekonomi politik perubahan iklim dan perkembangan (*ideas*, *power*, dan *resources*). Batasan antara ketiganya cukup fleksibel dengan hipotesis bahwa masing-masing konsep mendominasi tahapan tertentu dari proses kebijakan. Ide (*ideas* dan *ideologies* berperan dominan pada fase konseptualisasi, *power* di fase negosiasi, dan kapasitas institusional dan pemerintahan (*resources*) di tahapan implementasi.⁸⁶

1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis metode kualitatif berfokus menggunakan teks/kata-kata dalam mempresentasikan analisis dan data dari objek penelitian.⁸⁷ Penjelasan yang diterapkan dalam metode kualitatif kemudian bersifat rinci, sensitif terhadap konteks yang ada, dan mampu menjelaskan proses/runtutan kompleks dari fenomena penelitian.⁸⁸ Tujuan akhir dari penerapan metode ini adalah untuk mengembangkan payung penjelasan yang menyusun detail-detail spesifik ke

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), 380.

⁸⁸ Ibid, 343.

dalam gambaran utuh dan koheren serta menunjukkan kumpulan konsep relevan yang saling bertautan.⁸⁹ Penulis akan berupaya menjelaskan fenomena kebijakan *Green Deal* Uni Eropa dan konteks kebijakan energi Jerman dengan mendasarkan pola penelitian sesuai dengan prinsip-prinsip metode kualitatif berikut.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian melihat keperluan dalam mencari sumber data langsung (primer) dari aktor terkait seperti pernyataan-pernyataan atau dokumen resmi yang dikeluarkan di dalam proses/tahapan kebijakan. Bentuk data lain (sekunder) yang dimaksud juga meliputi sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber elektronik yang tersedia terkait konteks *Green Deal*, kebijakan Jerman, beserta dengan dinamika nasional dan internasional yang relevan. Kombinasi dari pengumpulan data ini diharapkan dapat menyusun gambaran yang proporsional untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Menelusuri pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, tulisan berikut akan dibagi ke dalam 4 bagian:

Bab 1 (Pendahuluan) – penjelasan berfokus memperkenalkan pembaca pada topik penulisan secara menyeluruh (dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,

⁸⁹ Ibid.

kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data, hingga struktur pembahasan). Pembahasan yang terdapat dalam pendahuluan membantu pembaca memahami letak anomali dan faktor yang mendorong adanya penelitian dan segala pembatasan yang akhirnya ditetapkan dalam menjawab rumusan masalah.

Bab 2 (Analisis Dinamika Kebijakan Perubahan Iklim Uni Eropa) – tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan deskripsi lengkap dari permulaan kebijakan perubahan iklim di Eropa. Penelusuran juga dilakukan dinamika konseptualisasi, negosiasi, dan implementasi di tingkat internasional dalam menghasilkan target-target kebijakan terkait.

Bab 3 (Analisis Dinamika Kebijakan Perubahan Iklim dan Energi di Jerman) – melanjutkan penjelasan bab 2, bagian ini akan menggunakan kerangka Tanner dan Allouche di tingkat nasional. Penjelasan dalam bab ini akan melanjutkan perkembangan kebijakan dalam Jerman setelah hadirnya kebijakan terbaru dibawah *Green Deal*. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan tentang tantangan-tantangan yang ada pada proses implementasi dan bagaimana pemerintahan Jerman memberikan respon.

Bab 4 (Kesimpulan) – bab ini akan menjabarkan kesimpulan yang ditarik dari data-data dan analisis yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya; menutup jawaban dari rumusan masalah yang telah dibentuk pada awal penelitian.